



# 2022 PERUBAHAN RENJA PD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. A. Yani Km. 4,5 Telp./Faks. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring  
Kec. Paringin Selatan 71618

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 800/028.4/Kpts/Ka/BKPSDM/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PADA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan;
2. Menyusun Rancangan Awal, Rancangan Rencana Kerja, dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan;
3. Melaksanakan penyelarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan komponen Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
4. Menetapkan target indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 dan 2023; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parangin  
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN,



**H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan  
Nomor 800/028.4/Kpts/Ka/BKPSDM/2022  
Tanggal 31 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BALANGAN

No.	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan	Ketua/Koordinator
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN	Anggota
5.	Kabid Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Anggota
6.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Dikeluarkan di Paringin  
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN,



**H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

## KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan harapan agar kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya serta berkesesuaian dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur, dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019.

Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Balangan. Renja tersebut juga merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dalam proses perumusan/penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebaik mungkin. Namun karena keterbatasan dalam banyak hal, maka kami menyadari bahwa renja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga perubahan renja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi BKPSDM Kabupaten Balangan.

Balangan, 22 Juli 2022

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



**H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Sistematika Penyusunan .....	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	4
BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	14
A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD .....	14
B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	15
C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	16
D. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD.....	17
D. Analisis Sosial Ekonomi.....	26
BAB IV PENUTUP.....	27

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel dan Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan II Tahun 2022	5
2.2	Evaluasi Hasil Identifikasi dan Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Prioritas Kabupaten Balangan s.d. Triwulan II Tahun 2022 serta Tindak Lanjut pada Triwulan Berikutnya	12
3.1	Hubungan Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	15
3.1	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	15
3.2	Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022	16
3.3	Matriks Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2022	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi riil dan empiris BKPSDM Kabupaten Balangan, evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan.

#### **A. Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam Langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran operasional untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah,

orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 dan reviu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) SKPD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkret dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana.

### **D. Sistematika Penyusunan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

- A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD
- B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- D. Analisis Sosial Ekonomi

#### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2022 menunjukkan hasil yang relatif positif. Rata-rata capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh bagian/bidang pada BKPSDM Kabupaten Balangan telah mencapai 77,16%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan adalah 59,32%. Program dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp 6.320.600.783,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*) atau terealisasi sebesar 39,35% dari total anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp16.064.142.792,00 (*enam belas miliar enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Catatan yang harus ditekankan adalah capaian beberapa indikator program masih menggunakan capaian tahun 2021. Indikator tersebut meliputi nilai SAKIP, persentase aset dalam kondisi baik, dan persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur. Adapun alasan yang melandasi hal dimaksud, yaitu:

1. Nilai SAKIP tahun 2022 masih menunggu hasil evaluasi Tim Inspektorat Kabupaten Balangan. Sehingga nilai tahun 2021 diasumsikan masih berlaku sampai diterbitkannya hasil penilaian terbaru;
2. Penilaian kondisi aset dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan secara teknis penilaiannya terkait dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan. Sambil menunggu instruksi dari bidang tersebut, maka hasil penilaian aset tahun 2021 masih relevan digunakan sampai terbit hasil penilaian/penaksiran terbaru;
3. Capaian pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur dibatasi hanya pada jenis kompetensi manajerial/kepemimpinan. Hasil penilaian tahun 2021 menunjukkan 35,70% aparatur telah memenuhi jenis kompetensi dimaksud. Capaian indikator program tersebut akan diperbarui pada akhir Triwulan IV tahun 2022.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Triwulan II Tahun 2022**

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/5x100%		10=4+8		11=10/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	72	34.656.249.750	71	1.308.560.302	65	5.997.853.392	71	1.043.918.482	71	2.875.207.360	71	2.875.207.360	109,23	47,94	71	2.875.207.360,00	98,61	8,30
	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100%		95,33%		100%		95,33 %		95,33 %		95,33 %	95,33		95,33 %		95,33		
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	430.195.000	100%	11.712.000	100%	115.587.350	45,45 %	380	63,64 %	8.512.000	63,64 %	8.512.000	63,64	7,36	63,64%	8.512.000,00	63,64	1,98
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	48 dokumen	183.912.000	8 dokumen	6.202.000	8 dokumen	76.554.800	2 dokumen	0	2 dokumen	4.080.000	2 dokumen	4.080.000	25,00	5,33	10 dokumen	10.282.000,00	20,83	5,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	20 dokumen	94.134.000	4 dokumen	0	4 dokumen	17.909.700	1 dokumen	380	2 dokumen	4.432.000	2 dokumen	4.432.000	50,00	24,75	6 dokumen	4.432.000,00	30,00	4,71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	18 dokumen	152.149.000	3 dokumen	5.510.000	3 dokumen	21.122.850	2 dokumen	0	3 dokumen	0	3 dokumen	0	100,00	0,00	6 dokumen	5.510.000,00	33,33	3,62
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														58,33	10,03			28,06	4,64

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		
								I		II			K		Rp		K	Rp	K
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/5x100%		10=4+8		11=10/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	28.806.728.150	94,44%	1.116.288.496	100%	4.380.920.182	50%	938.125.684	66,67 %	2.543.755.240	66,67 %	2.543.755.240	66,67	58,06	66,67%	2.543.755.240,00	66,67	8,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100%	28.296.350.350	100%	1.102.808.496	100%	4.248.476.382	25%	913.525.684	50%	2.507.453.240	50%	2.507.453.240	50,00	59,02	50%	2.507.453.240,00	50,00	8,86
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	417.747.000	100%	13.480.000	100%	114.643.250	25%	24.600.000	50%	35.642.000	50%	35.642.000	50,00	31,09	50%	35.642.000,00	50,00	8,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang- undangan	25 laporan	92.630.800	0 laporan	0	5 laporan	17.800.550	5 laporan	0	5 laporan	660	5 laporan	660	100,00	3,71	5 laporan	660.000,00	20,00	0,71
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														66,67	31,27			40,00	6,04
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.303.705.300	100%	67.030.477	100%	542.741.450	16,8 %	25.816.000	34,01 %	164.803.100	34,01 %	164.803.100	34,01	30,36	34,01%	164.803.100,00	34,01	7,15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	967.708.300	100%	0	100%	240.150.500	0,4 %	950	2,04 %	4.902.000	2,04 %	4.902.000	2,04	2,04	2,04 %	4.902.000,00	2,04	0,51
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	28080 eksempla r	106.553.000	4680 eksempla r	5.320.000	4680 eksempla r	16.023.000	1170 eksempla r	2.860.000	2340 eksempla r	7.900.000	2340 eksempla r	7.900.000	50,00	49,30	2340 eksempla r	7.900.000,00	8,33	7,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1.229.444.000	100%	61.710.477	100%	286.567.950	25%	22.006.000	50%	152.001.100	50%	152.001.100	50,00	53,04	50%	152.001.100,00	50,00	12,36
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														34,01	34,80			20,12	6,76
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	1.518.003.300	12 Bulan	85.525.829	12 Bulan	231.165.700	3 Bulan	61.562.498	6 Bulan	102.082.621	6 Bulan	102.082.621	50,00	44,16	18 Bulan	187.608.450,00	25,00	12,36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi,	100%	706.648.900	100%	38.463.229	100%	106.200.000	25%	24.831.698	50%	49.544.821	50%	49.544.821	50,00	46,65	50%	49.544.821,00	50,00	7,01

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sumber Daya Air dan Listrik																		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	811.354.400	12 bulan	47.062.600	12 bulan	124.965.700	3 bulan	36.730.800	6 bulan	52.537.800	6 bulan	52.537.800	50,00	42,04	18 bulan	99.600.400,00	25,00	12,28
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														50,00	44,35			37,50	9,64
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	1.597.618.000	12 bulan	28.003.500	12 bulan	727.438.710	3 bulan	18.034.300	6 bulan	56.054.399	6 bulan	56.054.399	50,00	7,71	18 bulan	84.057.899,00	25,00	5,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	100%	705.408.000	0%	28.003.500	100%	112.765.000	90%	11.735.300	90%	31.664.399	90%	31.664.399	90,00	28,08	90%	31.664.399,00	90,00	4,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	892.210.000	0%	0	100%	614.673.710	1%	6.299.000	5%	24.390.000	5%	24.390.000	5,00	3,97	5%	24.390.000,00	5,00	2,73
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														47,50	16,02			47,50	3,61
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)</b>														52,86	29,53			42,86	7,12
<b>Predikat Kinerja (Kegiatan)</b>														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>20.840.451.700</b>	<b>100%</b>	<b>864.606.453</b>	<b>100%</b>	<b>7.981.977.800</b>	<b>25%</b>	<b>608.694.700</b>	<b>50%</b>	<b>2.420.473.423</b>	<b>50%</b>	<b>2.420.473.423</b>	<b>50,00</b>	<b>30,32</b>	<b>50%</b>	<b>2.420.473.423,00</b>	<b>50,00</b>	<b>11,61</b>
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	70%	8.413.575.800	53%	351.308.020	55%	3.004.178.100	0%	81.078.000	29,25 %	188.689.656	29,25 %	188.689.656	53,18	6,28	29,25%	188.689.656,00	41,79	2,24
	Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100%		100%		100%		25%		50%		50%		50,00		50%		50,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	7.253.599.000	100%	338.068.020	100%	2.800.001.000	2%	59.960.000	15%	124.896.000	15%	124.896.000	15,00	4,46	15%	124.896.000,00	15,00	1,72

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/5x100%		10=4+8		11=10/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	100%	274.386.800	0%	5.280.000	100%	40.099.300	28%	2.640.000	60%	6.600.000	60%	6.600.000	60,00	16,46	60%	6.600.000,00	60,00	2,41
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100%	206.200.000	59.09%	7.960.000	100%	21.999.900	25%	2.640.000	50%	6.600.000	50%	6.600.000	50,00	30,00	50%	6.600.000,00	50,00	3,20
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada database BKN	100%	679.390.000	0%	0	100%	142.077.900	25%	15.838.000	50%	50.593.656	50%	50.593.656	50,00	35,61	50%	50.593.656,00	50,00	7,45
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														43,75	21,63			43,75	3,69
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100%	1.166.878.400	53%	67.632.300	100%	142.957.150	0%	16.927.000	35,13 %	82.737.000	35,13 %	82.737.000	35,13	57,88	35,13%	82.737.000,00	35,13	7,09
	Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode	100%		95.34%		100%		0%		98,51 %		98,51 %		98,51		99%		98,51	
Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100%	613.812.400	100%	56.032.300	100%	69.357.200	100%	14.727.000	233,33 %	53.389.000	233,33 %	53.389.000	233,33	76,98	233,33 %	53.389.000,00	233,33	8,70
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100%	553.066.000	95.34%	11.600.000	100%	73.599.950	37%	2.200.000	70%	29.348.000	70%	29.348.000	70,00	39,88	70%	29.348.000,00	70,00	5,31
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														151,67	58,43			151,67	7,00
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>														Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45%	9.938.148.000	62.11%	382.944.133	35%	4.621.448.200	3,92 %	475.139.000	7,48 %	2.084.621.000	7,48 %	2.084.621.000	21,37	45,11	7,48%	2.084.621.000,00	16,62	20,98
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	78 orang	1.693.677.250	5 orang	48.772.000	30 orang	1.211.999.250	0 orang	0	18 orang	154.469.000	18 orang	154.469.000	60,00	12,74	23 orang	203.241.000,00	29,49	12,00
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	3050 orang	2.708.921.850	359 orang	234.172.133	850 orang	1.696.232.250	223 orang	440.863.000	404 orang	846.206.000	404 orang	846.206.000	47,53	49,89	763 orang	1.080.378.133,00	25,02	39,88

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	
								I		II									
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/5x100%		10=4+8		11=10/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI	350 orang		0 orang		70 orang		22 orang		38 orang		38 orang		54,29		38,00		10,86	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	32 orang	2.290.338.000	6 orang	100.000.000	5 orang	394.323.000	0 orang	5.776.000	4 orang	305.776.000	4 orang	305.776.000	80,00	77,54	10 orang	405.776.000,00	31,25	17,72
	Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3	30%		0%		15%		7,34 %		7,34 %		7,34 %		48,93		7,34		24,47	
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	82.85%	1.609.526.300	0%	0	10%	198.745.950	0,86 %	28.500.000	3,18 %	48.500.000	3,18 %	48.500.000	31,80	24,40	3,18 %	48.500.000,00	3,84	3,01
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	1.635.684.600	0%	0	50%	1.120.147.750	3,68 %	0	4,91 %	729.670.000	4,91 %	729.670.000	9,82	65,14	4,91 %	729.670.000,00	4,91	44,61
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														47,48	32,82			13,50	16,75
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100%	1.321.849.500	99,83%	62.722.000	100%	213.394.350	99,97 %	35.550.700	99,97 %	64.425.767	99,97 %	64.425.767	99,97	30,19	99,97%	64.425.767,00	99,97	4,87
	Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100%		74,18%		100%		74,05 %		74,05 %		74,05 %		74,05		74%		74,05	
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP Aparatur yang direviu	90%	591.150.000	0%	48.290.000	50%	89.924.700	10%	12.812.000	33,4 %	29.975.067	33,4 %	29.975.067	66,80	33,33	33,4 %	29.975.067,00	37,11	5,07
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan (reward)	30 orang	134.700.000	0 orang	0	6 orang	24.740.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	100%	142.080.000	0%	0	100%	26.415.700	0%	17.266.700	100%	18.696.700	100%	18.696.700	100,00	70,78	100%	18.696.700,00	100,00	13,16
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100%	318.672.000	0%	14.432.000	100%	49.264.750	100%	5.472.000	100%	15.754.000	100%	15.754.000	100,00	31,98	100%	15.754.000,00	100,00	4,94
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Permohonan	100%	135.247.500	0%	0	100%	23.049.200	100%	0	100%	0	100%	0	100,00	0,00	100%	0,00	100,00	0,00

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	
		1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/5x100%		10=4+8	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Percearaan yang ditindaklanjuti																		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														73,36	27,22			67,42	4,63
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)</b>														61,74	19,92			27,64	5,03
<b>Predikat Kinerja (Kegiatan)</b>														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur</b>	100%	13.690.034.300	35,70%	673.711.219	66%	2.084.311.600	35,7 %	4.404.000	35,7 %	1.024.920.000	35,7 %	1.024.920.000	54,09	49,17	71,40%	1.698.631.219,00	71,40	12,41
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100%	13.690.034.300	68,75%	673.711.219	100%	2.084.311.600	0%	4.404.000	0%	1.024.920.000	0%	1.024.920.000	0,00	49,17	0%	1.024.920.000,00	0,00	7,49
	Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%		100%		100%		0%		99,21 %		99,21 %	99,21		99%			99,21	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	30 orang	13.690.034.300	0 orang	673.711.219	6 orang	2.084.311.600	0 orang	4.404.000	2 orang	1.024.920.000	2 orang	1.024.920.000	33,33	49,17	2 orang	1.698.631.219,00	6,67	12,41
	Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%		0%		100%		0%		100%		100%		100,00		100,00		100,00	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>														66,67	24,59			3,33	6,20
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)</b>														49,61	24,59			0,00	3,74
<b>Predikat Kinerja (Kegiatan)</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)</b>														77,16	43,84			55,00	8,08
<b>Predikat Kinerja (Program)</b>														Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)</b>														59,32	39,35			45,04	8,68

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		
								I		II									6
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/5x100%		10=4+8		11=10/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)</b>														Renda h	Sangat Renda h			Sangat Renda h	Sangat Renda h
<b>Jumlah Anggaran dari seluruh Program</b>						<b>16.064.142.79</b>		<b>1.657.017.18</b>		<b>6.320.600.78</b>		<b>6.320.600.78</b>							
						2		2		3		3							
<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</b>	1) manajemen/tata kelola internal organisasi yang terbangun cukup baik; 2) sumber daya yang tersedia (khususnya anggaran); serta 3) komunikasi dan koordinasi yang terjalin cukup baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM																		
<b>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</b>	1) masih dalam kondisi Pandemi Covid-19; 2) kemampuan adaptasi SDM tidak merata untuk menghadapi perubahan yang disruptif; serta 3) masalah klasik terkait keterbatasan anggaran																		
<b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya</b>	1) melakukan konsolidasi internal dan meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan; 2) mengoptimalkan sumber daya yang tersedia; dan 3) meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta kerja sama dengan pihak-pihak eksternal terkait																		

Di samping faktor pendorong, penghambat, dan tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1, BKPSDM juga menganalisis beberapa faktor pendorong dan penghambat yang terkait khusus dengan Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2022, yaitu: “Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”. BKPSDM Kabupaten Balangan tidak menjadi satu-satunya SKPD pengampu/penanggung jawab sasaran-sasaran pada prioritas tersebut, sehingga sinergitas dan kolaborasi dengan SKPD lain menjadi suatu keharusan. Adapun faktor pendorong dan penghambat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Hasil Identifikasi dan Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Prioritas Kabupaten Balangan s.d. Triwulan II Tahun 2022 serta Tindak Lanjut pada Triwulan Berikutnya**

Prioritas Kabupaten Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1	2	3	4
Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan sasaran sebagai berikut :			
a. Optimalisasi fungsi dan peran ASN sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amanat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 bahwa PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun;</li> <li>- Komitmen Kepala Daerah terhadap pengembangan SDM Aparatur yang diinterpretasikan pada dokumen Rencana Aksi Pengembangan SDM Aparatur Kab. Balangan Tahun 2022-2024;</li> <li>- Ketersediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi yang diharapkan berkontribusi positif terhadap profesionalisme ASN. Di mana kompetensi merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan bobot 40%; dan</li> <li>- Kerja sama di bidang kediklatan dengan berbagai lembaga pelatihan, baik instansi pemerintahan maupun swasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran pengembangan kompetensi yang tersedia pada BKPSDM Kab. Balangan belum mampu memenuhi hak pengembangan kompetensi 20 JP setiap tahun bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</li> <li>- Terbatasnya kouta peserta Pelatihan Kepemimpinan dari BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan;</li> <li>- Tidak semua pimpinan/pembuat keputusan pada SKPD yang mengetahui bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak PNS serta memfasilitasi pemenuhan hak tersebut; dan</li> <li>- Masih kurangnya kesadaran (<i>awareness</i>) dan motivasi pada diri pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tiap SKPD untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi ASN di satuan kerjanya masing-masing, antara lain dengan mengalokasikan anggaran pelatihan/<i>bimtek/lokakarya (workshop)</i> melalui mekanisme APBD Perubahan;</li> <li>- Menyiapkan dan merumuskan kebijakan yang dibutuhkan untuk memonitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; dan</li> <li>- Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan pemerintahan terakreditasi, khususnya BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan.</li> </ul>
b. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	Amanat peraturan perundangan dan kebijakan Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk menempatkan pegawai sesuai dengan prinsip sistem merit dan <i>the right man in the right place</i>	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, baik secara kuantitas atau jumlah pegawai maupun secara kualitas (misalnya: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diharapkan)	Melaksanakan mutasi dan promosi serta penempatan pegawai dengan mengoptimalkan SDM aparatur yang tersedia.
c. Implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi (eselon IV)	Ketersediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten	- Masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas yang belum teranggarkan mengikuti	- Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Bimtek Gelombang III bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan

Prioritas Kabupaten Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1	2	3	4
Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan sasaran sebagai berikut :			
di seluruh Perangkat Daerah	Balangan sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang.	pengembangan kompetensi; dan - Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi yang ditentukan, sesuai dengan jabatan yang dipangku oleh masing-masing pejabat tersebut.	Pengawas yang direncanakan berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang; - Mengusulkan penambahan alokasi anggaran kontribusi bimtek melalui mekanisme APBD Perubahan TA 2022 bagi 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional yang belum teranggarkan pengembangan kompetensinya; dan - Bidang Pengembangan SDM akan bersurat kepada BKN Regional VIII Banjarmasin terkait pelatihan fungsional bagi Pejabat yang terkena dampak Penyetaraan Jabatan Pengawas untuk dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing.

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

##### **A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD**

Tujuan strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 21021-2026 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Bupati Balangan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berikut:

##### **“Membangun Desa, Menata Kota**

##### **Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”**

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM dalam melaksanakan manajemen ASN adalah Misi Keempat. Tujuan misi tersebut, yaitu: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi”. Sedangkan sasaran dari Misi Keempat adalah: “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi”, dengan salah satu indikator berupa Nilai IKM. Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran dimaksud, ditetapkan dua program yang menjadi tanggung jawab BKPSDM berupa Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Beranjak dari Misi Keempat Bupati Balangan tersebut, maka tujuan strategis tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Balangan adalah Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Adapun sasaran strategis dari tujuan dimaksud adalah Optimalitas Tata Kelola dan

Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Keterkaitan hubungan antara Renstra PD BKPSDM Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada skema berikut:

RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026	RENSTRA PD BKPSDM TAHUN 2021-2026 (SKPD BARU)
<b>VISI</b>	<b>TUJUAN</b>
Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera	Meningkatnya profesionalitas ASN
	<b>Indikator Tujuan</b>
	Indeks Profesionalitas ASN
<b>MISI IV</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Optimalisasi tata kelola dan meningkatnya pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
<b>TUJUAN 4</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
<b>SASARAN 4.4</b>	2. Indeks Sistem Merit
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian
<b>Indikator Sasaran 4.4</b>	
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	

**Gambar 3.1. Hubungan Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026**

Adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran BKPSDM Kabupaten Balangan beserta indikator kinerjanya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra PD 2021-2026	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra PD 2016-2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	87	Optimalisasi Tata Kelola dan Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	75
					Indeks Sistem Merit	325
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	90

## B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Sasaran strategis beserta IKU BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021 tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022**

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Optimalisasi Tata Kelola dan Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	50
		Indeks Sistem Merit	265
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	90

Dalam rangka mencapai target tersebut, BKPSDM pada tahun 2022 telah merencanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Adapun total anggaran yang dialokasikan berjumlah Rp 16.064.142.792,00 (*enam belas miliar enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*). Rincian program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan rincian besaran anggaran masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.3.

### C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Sasaran strategis dan IKU beserta target masing-masing indikator sebagaimana Tabel 3.2 tidak mengalami perubahan. Jumlah program dan kegiatan juga tidak mengalami perubahan. Adapun perubahan terjadi pada jumlah sub kegiatan yang semula berjumlah 30 (tiga puluh), berkurang 1 (satu) menjadi 29 (dua puluh sembilan). Di samping itu, juga dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada beberapa sub kegiatan, karena adanya dinamika yang harus diantisipasi oleh BKPSDM Kabupaten Balangan ke dalam dokumen perencanaan. Dinamika dimaksud antara lain berupa perubahan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah serta kebutuhan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Kebutuhan anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah Rp 16.645.742.792,00 (*enam belas miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*). Total tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 581.600.000,00 (*lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) dibandingkan dengan anggaran Renja Perangkat Daerah sebelum perubahan. Adapun rincian anggaran perubahan beserta alasan atau hal-hal yang menjadi justifikasi kebutuhan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dituangkan pada pada kolom Catatan Penting Tabel 3.3.

#### **D. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 masing-masing berjumlah 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) sub kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
  - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
  - 4) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
    - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
    - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
    - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
    - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
    - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
    - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
    - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
  - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    - 1) Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    - 2) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
    - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
    - 4) Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
    - a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
      - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Matriks Perubahan Renja Perangkat Daerah**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan**  
**Tahun 2022**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN</b>				16,064,142,792				16,645,742,792	581,600,000		
				13,979,831,192				15,154,451,192	1,174,620,000		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM		65	5,997,853,392	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM		65	6,996,669,592	998,816,200		
	Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik		100.00%			Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik					
<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100.00%	115,587,350	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100.00%	115,587,350	0		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kab. Balangan	8 dokumen	76,554,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kab. Balangan	8 dokumen	76,554,800	0	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kab. Balangan	4 dokumen	17,909,700	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kab. Balangan	4 dokumen	17,909,700	0	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kab. Balangan	3 dokumen	21,122,850	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kab. Balangan	3 dokumen	21,122,850	0	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>		100.00%	4,380,920,182	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>		100.00%	4,835,920,182	455,000,000		

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	Kab. Balangan	100.00%	4,248,476,382	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	Kab. Balangan	100.00%	4,703,476,382	455,000,000	Tambahan kebutuhan belanja gaji dan tambahan penghasilan bagi ASN/PNS	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kab. Balangan	100.00%	114,643,250	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kab. Balangan	100.00%	114,643,250	0	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	Kab. Balangan	5 laporan	17,800,550	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	Kab. Balangan	5 laporan	17,800,550	0	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum</b>		<b>100.00%</b>	<b>542,741,450</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum</b>		<b>100.00%</b>	<b>904,357,650</b>	<b>361,616,200</b>		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Kab. Balangan	100.00%	240,150,500	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Kab. Balangan	100.00%	509,550,500	269,400,000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (tambah daya/instalasi listrik; laptop; printer; backdrop HPL Ruang Kaban; meja, backdrop, panggung, dan podium di aula; meja tenis beserta kelengkapannya; lcd proyektor; dekorasi ruang rapat; dan karpet	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Balangan	4680 eksemplar	16,023,000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Balangan	4680 eksemplar	19,023,000	3,000,000	Kekurangan biaya langganan surat kabar/koran	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	100.00%	286,567,950	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	100.00%	375,784,150	89,216,200	Biaya konsultasi dan koordinasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur yang dilakukan Kepala BKPSDM serta pejabat/aparatur terkait lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>231,165,700</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>363,365,700</b>	<b>132,200,000</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	100.00%	106,200,000	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	100.00%	116,200,000	10,000,000	Kekurangan biaya langganan listrik	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	12 bulan	124,965,700	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	12 bulan	247,165,700	122,200,000	- Tambahan honorarium bagi 13 orang Tenaga Harian Lepas	Subbag Umum dan Kepegawaian

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
										(THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) - Pengadaan seragam beserta kelengkapannya bagi ASN/PNS yang diperbantukan pada UKK Imigrasi Kab. Balangan - Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR), KORPRI, dan Olahraga bagi ASN	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>727,438,710</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>777,438,710</b>	<b>50,000,000</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	Kab. Balangan	100.00%	112,765,000	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	Kab. Balangan	100.00%	112,765,000	0	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	Kab. Balangan	100.00%	614,673,710	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	Kab. Balangan	100.00%	664,673,710	50,000,000	Biaya untuk revitalisasi WC kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku</b>		<b>100.00%</b>	<b>7,981,977,800</b>	<b>Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku</b>		<b>100.00%</b>	<b>8,157,781,600</b>	<b>175,803,800</b>		
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK</b>		<b>55.00%</b>	<b>3,004,178,100</b>	<b>Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK</b>		<b>55.00%</b>	<b>3,051,658,200</b>	<b>47,480,100</b>		
	<b>Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini</b>		<b>100.00%</b>		<b>Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini</b>		<b>100.00%</b>				
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	100.00%	2,800,001,000	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	100.00%	2,800,001,000	0	-	Subbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	Kab. Balangan	100.00%	40,099,300	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	Kab. Balangan	100.00%	40,099,300	0	-	Subbid Pengadaan, Pemberhentian

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
											dan Informasi Kepegawaian ASN
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	Kab. Balangan	100.00%	21,999,900	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	Kab. Balangan	100.00%	52,480,000	30,480,100	Biaya penyelenggaraan Hari Jadi KORPRI Tahun 2022	Subbid Kepangkatan dan Lembaga Profesi ASN
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada <i>database</i> BKN	Kab. Balangan	100.00%	142,077,900	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada <i>database</i> BKN	Kab. Balangan	100.00%	159,077,900	17,000,000	Biaya pembuatan aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kepegawaian	Subbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi		100.00%	142,957,150	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi		100.00%	183,207,150	40,250,000		
	Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu		100.00%		Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu		100.00%				
Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Balangan	100.00%	69,357,200	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Balangan	100.00%	109,607,200	40,250,000	Biaya pelaksanaan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, dan Fungsional dari target semula sebanyak 3 kali menjadi 8 kali pelantikan	Subbid Mutasi dan Promosi ASN
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	Kab. Balangan	100.00%	73,599,950	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	Kab. Balangan	100.00%	73,599,950	0	-	Subbid Kepangkatan dan Lembaga Profesi ASN
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		35.00%	4,621,448,200	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		35.00%	4,707,506,550	86,058,350		
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti <i>Assesment</i>	Kab. Balangan	30 orang	1,211,999,250	Jumlah ASN yang mengikuti <i>Assesment</i>	Kab. Balangan	60 orang	611,999,250	(600,000,000)	- Penggeseran anggaran/biaya pelaksanaan Seleksi Penerimaan Non ASN - Biaya pelaksanaan asesmen untuk Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan	Subbid Pengembangan Karir dan Kerjasama Kediklatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
										Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Balangan. Dari target semula direncanakan sebanyak 30 orang, bertambah menjadi 60 orang	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	Kab. Balangan	850 orang	1,696,232,250	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	Kab. Balangan	850 orang	1,925,272,250	229,040,000	Biaya magang bagi ASN/PNS yang akan dibebankan pada UKK Imigrasi Kab. Balangan	Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI		70 orang		Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI		70 orang				
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	Kab. Balangan	5 orang	394,323,000	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	Kab. Balangan	4 orang	561,315,350	166,992,350	- Penyesuaian jumlah ASN/PNS penerima beasiswa tugas belajar dokter spesialis, dari target semula 5 orang menjadi 4 orang - Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring ASN/PNS yang sedang menempuh tugas belajar serta berkonsultasi dan berkoordinasi tentang pengembangan karir aparatur dengan berbagai instansi terkait	Subbid Pengembangan Karir dan Kerjasama Kediklitan
	Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3		15.00%		Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3		15.00%				
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	Kab. Balangan	10.00%	198,745,950	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	Kab. Balangan	10.00%	216,871,950	18,126,000	Biaya konsultasi dan koordinasi dengan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi di luar Provinsi Kalimantan Selatan	Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Balangan	50.00%	1,120,147,750	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Balangan	50.00%	1,392,047,750	271,900,000	Biaya bimtek bagi 21 orang Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas yang tidak teranggarkan pada anggaran murni 2022	Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin		100.00%	213,394,350	Persentase pegawai ASN yang disiplin		100.00%	215,409,700	2,015,350		
	Persentase penghargaan yang		100.00%		Persentase penghargaan yang		100.00%				

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
	diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat				diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat						
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP Aparatur yang direviu	Kab. Balangan	50.00%	89,924,700	Persentase SKP Aparatur yang direviu	Kab. Balangan	50.00%	115,228,000	25,303,300	Terjadi perubahan signifikan aturan/pedoman penyusunan SKP. Perubahan tersebut harus didiseminasikan kepada ASN/PNS dan pihak-pihak berkepentingan terkait	Subbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan ( <i>reward</i> )	Kab. Balangan	6 orang	24,740,000	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan ( <i>reward</i> )	Kab. Balangan	0	0	(24,740,000)	Disebabkan adanya perubahan signifikan pada aturan/pedoman penyusunan SKP, di mana aturan/pedoman tersebut merupakan komponen penting dalam penilaian dan evaluasi kinerja dalam rangka pemberian penghargaan ( <i>reward</i> ). Pemberian penghargaan bagi ASN/PNS berprestasi/berkinerja terbaik akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023, setelah mekanisme penilaiannya selesai dirumuskan dan dimatangkan	-
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	Kab. Balangan	100.00%	26,415,700	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	Kab. Balangan	100.00%	26,415,700	0	-	Subbid Kesejahteraan dan Penghargaan ASN
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	100.00%	49,264,750	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	100.00%	48,603,000	(661,750)	-	Subbid Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	100.00%	23,049,200	Persentase Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	100.00%	25,163,000	2,113,800	Penyesuaian beberapa item belanja dan tambahan biaya untuk konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak/instansi terkait tindak lanjut permohonan cerai ASN/PNS	Subbid Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				2,084,311,600				1,491,291,600	(593,020,000)		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur		66.00%	2,084,311,600	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur		66.00%	1,491,291,600	(593,020,000)		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial		100.00%	2,084,311,600	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial		100.00%	1,491,291,600	(593,020,000)		
	Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar		100.00%		Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar		100.00%				
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	Kab. Balangan	6 orang	2,084,311,600	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	Kab. Balangan	6 orang	1,491,291,600	(593,020,000)	Penyesuaian jumlah peserta Prajabatan/Latsar bagi Calon PNS, dari target semula sebanyak 137 orang menjadi 127 orang	Subbid Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar		100.00%		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar		100.00%				

#### **D. Analisis Sosial Ekonomi**

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 tidak berdampak langsung terhadap peningkatan sosial ekonomi, karena tugas dan fungsi (*core business*) BKPSDM Kabupaten Balangan adalah Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur. Jadi, layanan BKPSDM Kabupaten Balangan bersifat *segmented* pada Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau tidak terkait dengan pelayanan dasar kepada publik sebagai masyarakat dalam arti luas. Dengan kata lain, BKPSDM merupakan lembaga teknis penunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keluaran, dampak, dan manfaat pada aspek sosial dan ekonomi memang tidak dapat diukur dan dianalisis secara langsung melalui dokumen renja, tetapi harus diakui bahwa BKPSDM berperan penting dalam pemberian layanan kepegawaian dan pengembangan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) sebagai ASN. Sehingga diharapkan aparatur tersebut dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan serta memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, renja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan pada dokumen renja yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di samping itu, perubahan rencana dibutuhkan untuk mengantisipasi dinamika dan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini sudah melalui tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal. Sehingga keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan BKPSDM Kabupaten Balangan. Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran BKPSDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-P SKPD Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran BKPSDM Tahun 2022. RKA-P tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2022.
2. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan

kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.

3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kabupaten Balangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2022 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini diharapkan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, target program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Balangan. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Balangan, 22 Juli 2022

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



**H. Sufriannor, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009